



TANTANGAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TATA KELOLA SAMPAH KOTA BERKELANJUTAN

CHALLENGES OF STAKEHOLDERS PARTICIPATION IN THE SUSTAINABLE URBAN WASTE MANAGEMENT

Mardianto Haholongan Napitupulu^{a*}, Ali Muhyidin^a

^aDepartemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia; Depok

*Korespondensi: mardianto.haholongan@ui.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 24 November 2020
- Artikel diterima: 5 Februari 2021
- Tersedia Online: 8 Desember 2021

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi telah memicu permasalahan sampah perkotaan yang tidak terkendali. Perkembangan kajian sejak tahun 1990-an menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sampah tidak dapat dicapai tanpa tata kelola kolaboratif. Penelitian terkait tantangan bagaimana meningkatkan partisipasi masing-masing pemangku kepentingan menjadi penting dalam kajian tata kelola sampah kota berkelanjutan. Untuk itu, tinjauan literatur dilakukan, dimana 22 artikel terkait dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola sampah kota secara berkelanjutan. Kemudian memetakan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Tantangan yang ditemukan oleh berbagai peneliti sejauh ini adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut. Analisis artikel ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal dalam tata kelola sampah kota. Akan tetapi, kerja sama antar pemangku kepentingan dapat menawarkan peluang terbaik untuk menciptakan tata kelola yang sesuai. Beberapa perubahan perilaku pemangku kepentingan dibutuhkan dari hulu hingga hilir pengelolaan sampah. Berdasarkan tinjauan literatur ini, kajian tata kelola sampah kota berkelanjutan telah berkembang hingga tahap pembahasan berbagai permasalahan, tanggung jawab dan hubungan dari tiga pemangku kepentingan utama. Penelitian lanjutan mengenai peran kemitraan publik-swasta khususnya di tingkat lokal diperlukan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat, Pemangku kepentingan, Pemerintah, Pengelolaan sampah.

ABSTRACT

Economic growth and urbanization have triggered an uncontrolled urban waste problem. The development of studies since the 1990s shows that the implementation of waste management cannot be achieved without collaborative governance. Research related to the challenges on how to increase the participation of each stakeholder is important in the study of sustainable municipal waste management. Therefore, a literature review was conducted, where 22 related articles were analyzed to obtain better understanding of the sustainable municipal solid waste management. Afterwards, the relations between government, private sector and society as determinant factors of the management success were mapped. The challenge that various researchers have found so far is collaboration among these stakeholders. The analysis carried out in this article showed that there was no single best approach in managing municipal solid waste. However, collaboration among stakeholders could offer the best opportunity to create an appropriate governance. Some changes in the behavior of stakeholders are needed from the upstream to the downstream of waste management processes. Based on the literature review, study of sustainable municipal solid waste management has been developing into the discussion of various problems, responsibilities and relationships between the three main stakeholders. For further studies, research on the roles of public-private partnerships, especially at the local level, is needed, aiming to improve the quality of education and community awareness in sustainable waste management.

Keyword: Society, Stakeholders, Government, Waste management

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi telah menyebabkan peningkatan pertumbuhan produksi sampah dalam skala global. Proses penanganan sampah sebuah kota tentu bukan menjadi hal yang mudah, mengingat pasokan sampah perkotaan yang tergolong cukup besar. Tercatat, lebih dari 1,47 miliar ton limbah padat setiap tahun dihasilkan di seluruh dunia, yang sebagian besar dikelola dengan tidak efisien (Zaman, 2016). Pemerintah kota pada umumnya membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mesin insinerasi untuk mengolah sampahnya. Namun, kebijakan yang hanya mengandalkan pendekatan tersebut seringkali hanya menghasilkan masalah kesehatan dan lingkungan pada masyarakat. Oleh karena itu strategi untuk menciptakan tata kelola sampah berkelanjutan penting dicapai berbagai kota, baik untuk negara maju maupun berkembang.

Secara umum tata kelola sampah berkelanjutan adalah sistem pengumpulan dan pengolahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencegah, mendaur ulang, dan memulihkan pencemaran sampah perkotaan. Berbagai strategi dibuat demi menemukan solusi terbaik dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Pentingnya pembangunan berkelanjutan ini semakin dipertegas oleh kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDG)* oleh 190 negara. Tujuan ke-11 dalam SDG menekankan pentingnya menciptakan kota dengan hunian warga yang inklusif, aman, tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan. Tujuan ke-11 ini secara lebih rinci dijelaskan menjadi 10 butir turunan, dimana butir keenamnya adalah mengurangi dampak lingkungan perkotaan dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa tata kelola sampah merupakan satu hal terpenting dalam mendesain kota berkelanjutan.

Tata kelola sampah telah menjadi masalah yang krusial yang dihadapi oleh berbagai kota di dunia. Volume sampah rumah tangga di perkotaan yang sangat besar menimbulkan tekanan bagi pemerintah kota dalam mengelola sampah secara lebih berkelanjutan. Agar sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, sistem tersebut harus efektif secara lingkungan, terjangkau secara ekonomi, dan dapat diterima secara sosial. Partisipasi masyarakat perkotaan dengan melakukan pemilahan dan daur ulang sampah sangat penting untuk mengurangi dampak timbunan sampah. Terlebih dalam mengelola sampah mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan dinamis. Aspek tersebut berupa sosial ekonomi, politik, lingkungan, teknologi dan peran pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah kota adalah sistem sosial-ekologi kompleks yang membutuhkan kesadaran lingkungan dan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas (Lishan et. al., 2020). Berbagai kajian yang berkembang telah berusaha menelaah permasalahan dan solusi tata kelola sampah kota berkelanjutan. Kajian tentang modernisasi tata kelola sampah di negara-negara maju terbentuk sejak tahun 1970-an. Solusi tata kelola sampah pada masa itu hanya melihat melalui perspektif *engineering*. Namun, perkembangan kajian pada tahun 1980-an hingga 1990-an menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sampah kota tidak dapat dicapai tanpa kerja sama antara masyarakat dan pemerintah (UN-Habitat, 2010). Kajian kemudian berkembang dan disadari bahwa perkembangan teknologi pengelolaan sampah pada dasarnya dikontrol oleh institusi, pemerintah dan juga kerangka kebijakan politik. Kesenjangan implementasi kebijakan sampah kota diantara pembuat kebijakan, birokrasi penyedia layanan dan juga masyarakat menjadi permasalahan yang sering ditemukan (Zotos et. al, 2009). Dibutuhkan langkah-langkah institusional yang mampu mendorong pendekatan kolektif dan juga memberikan kenyamanan untuk dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Zaman dan Lehman (2011) menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait faktor pendorong yang mempengaruhi tata kelola sampah kota dibidang politik.

Dalam perspektif politik, para akademisi telah mengembangkan berbagai kajian tentang kinerja para pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah perkotaan. Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang secara langsung dipengaruhi atau mempengaruhi keputusan atau bertanggung jawab atas suatu keputusan. Dukungan, peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan dan

mempertahankan konsistensi tata kelola sampah kota berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk ditelaah (Joseph, 2006; Lishan et. al., 2020). Adapun pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah perkotaan terbagi atas tiga yaitu pemerintah sebagai penyedia layanan; masyarakat sebagai klien; dan kemitraan publik-swasta sebagai agen eksternal. Pemangku kepentingan ini tidak dapat mengandalkan aspek teknis saja untuk menciptakan tata kelola sampah berkelanjutan. Sebab, tidak ada pendekatan yang ideal yang dapat diadopsi dan bekerja secara efektif untuk mengurangi volume sampah perkotaan tanpa melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan semua aspek pendukung lainnya. Partisipasi dan komitmen antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan tata kelola sampah kota secara berkelanjutan.

Para akademisi telah berusaha mengidentifikasi kinerja para pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. Namun berdasarkan perkembangan kajian, terdapat beberapa perdebatan mengenai tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Misalnya, beberapa akademisi sepakat bahwa insentif ekonomi bekerja efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat (Zaman & Lehman, 2011; Xu et. al., 2018). Sementara, kajian terbaru menunjukkan bahwa insentif ekonomi belum tentu mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengelola sampah berkelanjutan (Fitristanti & Nurjannah, 2017; Wangsadasastra, 2020). Perkembangan pandangan akademis mengenai tantangan dan hubungan antar pemangku kepentingan dalam dimensi tata kelola sampah berkelanjutan menjadi penting untuk ditelaah. Berdasarkan studi yang ada menunjukkan bahwa tidak ada satupun akademisi secara eksplisit berusaha menangani dimensi tantangan pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota.

Berdasarkan berbagai kajian tata kelola sampah kota yang telah berkembang, artikel ini berusaha mengkaji bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan dan tantangan yang dihadapinya dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi tata kelola sampah berkelanjutan di tingkat kota.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Studi

Pemilihan ini bersifat perbandingan dengan membandingkan kasus dari berbagai negara. Lokasi studi pada penelitian ini secara eksplisit membandingkan tata kelola sampah kota berkelanjutan di berbagai belahan dunia, seperti di Asia meliputi negara-negara Bangladesh, India, Pakistan, China, Vietnam, dan Indonesia; Eropa meliputi Inggris, Swedia, Jerman, dan Belanda; dan juga Afrika seperti negara Ethiopia. Pemilihan negara-negara tersebut bertujuan untuk merepresentasikan perkembangan berbagai kajian dan praktik pengelolaan sampah kota di berbagai belahan dunia. Pemilihan studi di Inggris, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dan Cina bertujuan untuk menggambarkan dinamika tata kelola sampah kota sebagai negara maju. Negara-negara seperti Vietnam, India, Indonesia dan Ethiopia dianggap merepresentasikan negara-negara berkembang dan negara belum berkembang.

2.2. Kebutuhan Data

Untuk mencapai tujuan yang diusulkan dalam pendahuluan tulisan ini, maka dilakukan kajian literatur yang mendalam. Data yang dikumpulkan dari kajian ini meliputi data terkait manajemen dan tata kelola sampah kota di berbagai negara. Data tersebut utamanya berasal dari data sekunder seperti naskah jurnal, data hasil laporan penelitian serta naskah tesis atau disertasi yang membahas isu terkait. Metode ini dipilih untuk mengintegrasikan informasi secara efisien khususnya bagi para peneliti, pembuat kebijakan, serta mengurangi kemungkinan replikasi dan kesalahan penelitian lanjutan (Mulrow, 1994). Mengikuti pendoman Trandfiel et. al. (2003) dan Moher et. al. (2009), pedoman dalam studi literatur terbagi menjadi lima langkah: (i) definisi tujuan penelitian; (ii) pemilihan database, (iii) identifikasi kata kunci; (iv) pemilihan artikel yang kompatibel, dan (v) ekstraksi data.

Berkaitan dengan langkah (i), penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi hubungan antar pemangku kepentingan dan tantangan yang dihadapinya dalam mewujudkan tata kelola sampah kota berkelanjutan. Untuk langkah pemilihan database (ii), penulis memutuskan untuk mencari data dalam *Science Direct* dan *Google Scholar*. Pemilihan database *Science Direct* sebagai database yang paling banyak digunakan peneliti lingkungan dalam meninjau literatur (Knickmeyer, 2020). Sementara database *Google Scholar* digunakan untuk membuat penelitian semakin terbuka dan membantu menjawab beberapa kekosongan penelitian yang ditemukan dari database pertama. Kata kunci (iii) dicari melalui dua langkah. Tahap awal berfokus pada pencarian istilah “tata kelola sampah” yang harus ada pada judul, abstrak, kata kunci, dan tujuan sebuah artikel penelitian. Tahap selanjutnya, penulis mempertajam pencarian dengan fokus pada isu pembangunan berkelanjutan, tantangan pengurangan sampah, pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, komunitas, organisasi, dan kemitraan publik-swasta. Setelah menemukan berbagai artikel yang relevan berdasarkan kata kunci, (iv) proses pemilihan artikel dimulai dengan pembacaan dan pemetaan 50 artikel telah ditemukan. Kriteria artikel yang dipilih meliputi kajian internasional dan nasional. Penulis kemudian hanya memilih artikel yang pertanyaan dan hasil penelitiannya berkaitan langsung dengan tujuan penelitian ini. Pemilihan kajian internasional difokuskan pada artikel yang sudah terindeks Scopus. Sementara pada kajian nasional lebih berfokus pada kajian yang telah terindeks Shinta. Pada akhir langkah ini, kumpulan artikel terpilih yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 artikel utama yang secara efektif meliputi masalah tersebut. Adapun datang yang digunakan, diolah, beserta sumber databasenya dapat dilihat pada Tabel 1. Kemudian (v) dilakukan ekstraksi data.

Tabel 1. Kebutuhan Data

No.	Nama Jurnal atau Penerbit	Bentuk Data	Penulis (Tahun)	Topik Area	Database
1.	<i>Waste Management</i>	Jurnal	Andersson et. al. (2018); Lu et. al. (2006); Tadesse et. al. (2008); Xu et. al. (2018); Zotos et. al. (2009)	Swedia, Taiwan, Ethiopia, China, Yunani (Greece).	<i>Science Direct</i>
2.	<i>Resources, Conservation and Recycling</i>	Jurnal	Christensen & Bach (2015)	Vietnam, Denmark.	<i>Science Direct</i>
3.	<i>Business Management Journal</i>	Jurnal	Fitriasari & Nurjannah (2017)	Indonesia.	<i>Google Scholar</i>
4.	<i>Habitat International</i>	Jurnal	Joseph (2006); Permana et. al. (2015)	India. Indonesia.	<i>Science Direct</i>
5.	<i>Journal of cleaner production</i>	Jurnal	Knickmeyer (2020); Lishan et. al. (2020); Uyarra & Gee (2013); Zaman (2016)	Global, China, Inggris, Global.	<i>Science Direct</i>

No.	Nama Jurnal atau Penerbit	Bentuk Data	Penulis (Tahun)	Topik Area	Database
6.	<i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i>	Jurnal	Nahrudin (2016).	Indonesia.	<i>Google Scholar</i>
7.	<i>Academic Press</i>	Buku	Periathamby (2011)	Global.	<i>Science Direct</i>
8.	<i>Jurnal Administrasi Publik</i>	Jurnal	Verawati (2020)	Indonesia.	<i>Google Scholar</i>
9.	Universitas Brawijaya	Disertasi	Wangsadisastra (2020)	Indonesia.	<i>Google Scholar</i>
10.	<i>Jurnal Rekayasa Lingkungan</i>	Jurnal	Widodo (2010)	Indonesia.	<i>Google Scholar</i>
11.	<i>Journal of Environmental Planning</i>	Jurnal	Wong (2017)	Taiwan.	<i>Science Direct</i>
12.	<i>Ocean & Coastal Management</i>	Jurnal	Yeung (2001)	Asia.	<i>Science Direct</i>
13.	<i>City, Culture and Society</i>	Jurnal	Zaman & Lehman (2011)	Global.	<i>Science Direct</i>
14.	UN-HABITAT	Buku	Un-Habitat (2010)	Global.	<i>Google Scholar</i>

2.3. Analisa Data

Analisis kajian literatur ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu : evaluasi data, interpretasi data, dan yang terakhir mengkonstruksikan data. Dalam tahapan pertama, kumpulan artikel jurnal yang terkait dengan isu penelitian dikategorikan, diidentifikasi serta dipilih data mana saja yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap kedua yaitu menginterpretasikan data, peneliti menggabungkan data dari setiap artikel penelitian terpilih dan kemudian melakukan penafsiran atas berbagai perkembangan dan perdebatan yang ada. Terakhir dalam tahapan ketiga, peneliti mengkonstruksikan tantangan pengelolaan sampah kota berkelanjutan berdasarkan masing-masing pemangku kepentingan. Analisis difokuskan pada pemerintah, masyarakat dan kemitraan publik-swasta sebagai tiga pemangku kepentingan utama yang mewujudkan tata kelola sampah kota berkelanjutan.

Kajian literatur ini kemudian disusun menjadi empat bagian utama. Bagian pertama, menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah yang menunjukkan keterbatasan penelitian sebelumnya. Bagian kedua, menyajikan metode yang digunakan untuk mengembangkan kajian literatur ini. Setelah bagian metode penelitian ini, bagian ketiga dimulai dengan menjelaskan konsep *participatory governance* dalam tata kelola sampah di tingkat lokal. Setelah itu, analisis perkembangan kajian pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota dari masa ke masa. Diakhir bagian ini, membahas bagaimana perkembangan tantangan dari tiga pemangku kepentingan utama dalam tata kelola sampah perkotaan. Sementara bagian keempat, membahas hasil dan mengusulkan penelitian masa depan untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum *Participatory Governance* dalam Tata Kelola Sampah Tingkat Otoritas Lokal

Participatory governance atau tata kelola partisipatif adalah suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (Fung & Wright, 2001). Kehadiran pendekatan tata kelola partisipatif dalam mengelola sampah kota tidak lepas dari latar belakang desentralisasi pusat-daerah. Secara garis besar, desentralisasi adalah pemberian kekuasaan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek terkait kepentingan wilayahnya. Bevir (2009) percaya bahwa desentralisasi berdampak besar dalam pemerintahan kota karena menghilangkan supremasi pemerintah pusat. Desentralisasi membuat kinerja politisi lebih akuntabel karena kinerjanya lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga membuat struktur demokrasi juga semakin kuat. Pendelegasian kekuasaan di tingkat kota pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesempatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih dekat dengan kekuasaan dan sumber daya pemerintahan.

Keterlibatan pemangku kepentingan khususnya aktor non-negara dalam proses kebijakan tidak hanya mengurangi beban pemerintah, tetapi mencerminkan nilai inti demokrasi. Tata kelola partisipatif yang dimaksud disini adalah partisipasi dari bawah ke atas. Artinya kebijakan yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan profesional dan pengalaman masyarakat, bukan dominasi elit. Berbagai bentuk pendekatan partisipatif telah berkembang untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat seperti: audiensi publik, jajak pendapat, lobi, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap kepentingan, prioritas, dan posisi pemangku kepentingan sudah seharusnya teradvokasi secara maksimal. Partisipasi ini pada akhirnya berimplikasi positif dalam meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam hal pengelolaan sampah kota berkelanjutan, pemerintah kota tidak lagi terbebani mendaur ulang sampah karena tiap-tiap warga telah berkontribusi dari rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah melakukan difusi kekuasaannya pada berbagai pemangku kepentingan daerah dan melibatkan aktor-aktor tersebut dalam proses kebijakan.

Joseph (2006) menemukan fakta bahwa partisipasi semua pemangku kepentingan mulai dari penghasil sampah, pengolah sampah, agen formal-informal, organisasi non pemerintah dan institusi keuangan adalah faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola sampah berkelanjutan. Ketersediaan teknologi atau alat bukan jaminan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik. Pengelolaan sampah kota berkelanjutan membutuhkan kerangka kerja lintas disiplin yang komprehensif untuk menciptakan tata kelola yang sesuai. Tiap-tiap kota pada dasarnya tidak memiliki sumber daya dan kapasitas yang sama untuk mengelola sampahnya. Kota-kota di negara maju mungkin memiliki kelebihan dalam kemajuan teknologi, sumber daya dan pengetahuan. Sementara kota di negara-negara berkembang masih terbatas dalam hal sumber daya maupun teknologi. Hal itulah yang sering sekali menjadi latar belakang kualitas tata kelola partisipatif dalam sampah perkotaan menjadi tidak efektif. Dibutuhkan perbaikan perundang-undangan, mekanisme koordinasi dan pendidikan publik untuk mendorong tata kelola sampah partisipatif ini. Hal ini disebabkan dinamika sosial-politik tertentu terkait peran pemangku kepentingan yang dimiliki setiap kota.

3.2. Perkembangan Kajian Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Sampah

Perkembangan kajian pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah perkotaan berawal dari kajian Yeung pada awal tahun 2000-an. Yeung (2001) berargumen bahwa dibutuhkan kerangka kerja yang komprehensif dan terinformasi dari para pengelola sampah kota sebagai langkah pertama dalam perbaikan tata kelola sampah perkotaan. Dalam implementasinya, kerangka kerja tersebut dikeluarkan pemerintah kota dalam bentuk sebuah kebijakan. Pemerintah kota dilihat para ahli sebagai pemangku kepentingan utama yang mendasari transformasi infrastruktur dan tata kelola sampah perkotaan. Kajian terkait partisipasi pemerintah dalam tata kelola sampah perkotaan diawali oleh Lu et. al. (2006) yang mengungkapkan bahwa pemerintah kota memiliki peran untuk menciptakan kebijakan penggabungan

sistem pengumpulan sampah dengan program pengolahan sampah. Kajian terkait dimensi pemerintah dalam tata kelola sampah perkotaan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Widodo (2010) melihat bahwa selain menciptakan sistem tata kelola sampah terintegrasi, pemerintah juga memiliki tugas melakukan sosialisasi pengolahan sampah pada masyarakat. Sementara di tahun setelah 2010 hingga 2020, perkembangan kajian ini menemukan bahwa minimnya partisipasi pemerintah dalam mensosialisasikan pengolahan sampah berkelanjutan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dominasi kepentingan elit dan kurangnya komitmen pemerintah kota (Uyerra & Gee, 2013; Verawati & Tuti, 2020). Melalui perkembangan kajian hingga 2020, terlihat para ahli terus berusaha memperbaharui kajian secara mendalam terkait pentingnya partisipasi pemerintah kota dalam pengelolaan sampah kota berkelanjutan.

Hal yang hampir sama juga ditemukan dalam perkembangan kajian partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Kajian ini awalnya berkembang sejalan dengan dikenalkannya konsep *participatory governance*. Konsep tersebut dikenalkan Fung dan Wright (2001) untuk menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Perkembangan kajian akan pentingnya partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilihat para ahli dalam dimensi pengelolaan sampah kota berkelanjutan. Kajian terkait hal tersebut berawal pada penelitian Joseph (2006) yang menyoroti bahwa masyarakat sebagai penghasil sampah perkotaan terbanyak memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap permasalahan sampah. Sejak saat itu signifikansi masyarakat sebagai pemangku kepentingan terus dikaji oleh berbagai akademisi hingga saat ini. Awalnya peranan masyarakat dikaji sebagai aktor yang sifatnya membantu pemerintah dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan sampah perkotaan. Namun, perkembangan kajian hingga tahun 2020 mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak tersosialisasi dan teredukasi justru menjadi penghambat implementasi kebijakan tata kelola sampah yang dikeluarkan pemerintah kota (Verawati & Tuti, 2020). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah perkotaan terlihat dari konsistensi pandangan ahli sejak 2001 hingga 2020 yang tidak bisa mengabaikan peran serta masyarakat.

Perkembangan tren kajian pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah perkotaan terjadi sejak tahun 2010. UN-Habitat (2010) menemukan bahwa kemitraan publik-swasta membantu pemerintah kota untuk menciptakan tata kelola sampah yang sesuai dan berkelanjutan. Prospek kajian pengelolaan sampah melalui kemitraan publik-swasta kemudian menjadi perhatian Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sejak tahun 2013, terutama pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20. Sebelum tahun 2010, kajian pengelolaan sampah kota dengan kemitraan publik-swasta belum dianggap penting karena dilihat hanya sebatas masalah pemerintah kota. Namun pasca KTT Rio+20 tersebut, kajian pengelolaan sampah dengan mempertimbangan kontribusi swasta terus berkembang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan pengelolaan sampah di seluruh dunia. Sebagai tindak lanjut, PBB membentuk *Global Waste Management Outlook (GWMO)* untuk mendorong kajian dalam meningkatkan efisiensi tata kelola sampah di berbagai negara. PBB melihat bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perhatian dunia diperlukan dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mensinergikan taat kelola sampah perkotaan.

Kajian tata kelola sampah perkotaan semakin berkembang dan dilihat sebagai masalah global yang kritis karena dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan baik (Knickmeyer, 2020). Pengelolaan sampah perkotaan pada akhirnya tidak hanya masalah domestik saja. Prioritas kesehatan masyarakat akibat krisis pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan terkoordinasi antara publik dan swasta. Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Negara-negara seperti Cina, India, Indonesia, Vietnam, Jerman, Belanda, Inggris, dan negara Eropa lainnya telah memiliki kemitraan satu dengan yang lainnya untuk mengelola sampahnya. Walaupun belum banyak yang membahas tren kajian ini, tetapi kontribusinya cukup signifikan dalam mendorong efisiensi tata kelola sampah berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan tren kajian terkait kemitraan publik-swasta di tingkat pemerintah kota sangat diperlukan. Kemitraan publik-swasta sebagai agen eksternal pada akhirnya dapat

mendistribusikan perkembangan pengetahuan dan energi terbarukan guna menciptakan tata kelola sampah yang lebih ekonomis.

3.3. Tantangan Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Sudah tidak diragukan lagi, tata kelola sampah kota berkelanjutan memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Berangkat dari aspek lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan memberikan manfaat dalam pengurangan timbunan sampah dan dampak negatifnya, peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, kesempatan menghasilkan energi terbarukan, dan juga pengurangan bahan baku beracun dalam produk. Bagi masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan pada dasarnya meminimalkan resiko berbagai penyakit akibat kesalahan tata kelola sampah. Disamping itu, daur ulang sampah membuka peluang bertambahnya penghasilan ketika sampah tersebut mempunyai nilai tambah atau menjadi energi terbarukan. Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya, tata kelola sampah berkelanjutan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi pelaku industri maupun pemerintah. Melalui tata kelola sampah berkelanjutan, desain produk akan semakin bersaing untuk menjadi lebih baik dan lebih lama digunakan. Hal ini kemudian akan sejalan dengan kepuasan pelanggan dan keberlangsungan bisnis kedepannya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki rasa bertanggung bersama dalam mengelola sampah kota secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, tata kelola sampah berkelanjutan menghadirkan berbagai tantangan. Gambaran umum tantangan yang dihadapi berbagai pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2. Berbagai akademisi menemukan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah berkelanjutan adalah kerja sama yang efektif diantara berbagai pemangku kepentingan (Joseph, 2006; Zotos, 2009; Lishan et.al., 2020 ; Periathamby, 2011). Kemajuan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara tidak serta merta sejalan dengan baiknya partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. Studi kasus di berbagai kota di dunia mengungkapkan bahwa ketidakjelasan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pemerintahan menunjukkan hasil yang relatif tidak efektif dalam pengelolaan sampah kotanya. Seperti halnya yang terjadi di beberapa Kota di Cina. Kota Shanghai menjadi satu-satunya kota percontohan dalam pengelolaan sampah kota di Cina. Sementara karakteristik hubungan antar pemangku kepentingan pada kota-kota besar lainnya di Cina cenderung eksploratif dan kompetitif (Lishan et. al., 2020). Hal yang senada juga terjadi pada Kota Manchester, Inggris, yang justru berencana mentransformasi tata kelola sampahnya dengan pembangunan dan pengoperasian pabrik insinerasi (Uyarra & Gee, 2013). Langkah ini kemudian mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat khususnya penggiat lingkungan. Polusi udara hasil insinerasi ini jelas tidak sesuai dengan prinsip ramah lingkungan maupun pembangunan kota berkelanjutan. Namun bagi pemerintah kota, penggunaan insinerasi atau mesin pembakar sampah adalah cara yang paling efisien mengelola sampah perkotaan. Kesenjangan pemahaman antar dua aktor ini pada akhirnya menyebabkan potensi ketidakefisienan pengelolaan sampah serta tidak memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2. Keterlibatan Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Kota Berkelanjutan

Pemangku Kepentingan	Peranan	Tantangan	Strategi Penyelesaian
Pemerintah	Pembuat kebijakan, infrastruktur dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah berkelanjutan.	Dominasi birokrasi yang menimbulkan ketidakjelasan program dan menghambat aktivitas pengelolaan sampah.	Tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Pemangku Kepentingan	Peranan	Tantangan	Strategi Penyelesaian
Masyarakat	Pelaksana pengelolaan sampah berkelanjutan.	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.	Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.
Kemitraan Publik - Swasta	Menciptakan tata kelola sampah kota yang efisien.	Terkendala dalam aliran pendapatan dan masih bersifat teknis.	Melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

a. Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Kajian dekade 2000-an menunjukkan bahwa peran pemerintah cenderung dilihat sebagai satu-satunya aktor yang menyelesaikan masalah tata kelola sampah perkotaan. Pemerintah kota telah menjadi salah satu dimensi terpenting yang mendasari transformasi infrastruktur tata kelola sampah perkotaan (Zotos et. al., 2009). Namun dalam implementasinya, pemerintah kota seringkali luput dalam mengatur tata kelola sampah kotanya seperti yang terjadi pada kota-kota besar di pesisir Asia (Yeung, 2001). Kajian dalam era ini memberikan pembelajaran bahwa tata kelola sampah kota akan terisolasi dari program nasional jika tidak didukung anggaran dan kapasitas substansial. Berangkat dari pembelajaran tersebut, perkembangan kajian setelah tahun 2010-an menunjukkan bahwa berbagai tantangan yang melatarbelakangi krisis tata kelola sampah perkotaan. Dalam era ini, para akademisi menemukan bahwa tantangan utama penanganan sampah kota adalah didominasi birokrasi pemerintah mulai dari tahap pemilahan sampah hingga tahap pemrosesan akhir. Pemerintah kota sering sekali mendapat desakan untuk mengganti kebijakan tata kelola sampah yang tidak sesuai dengan prioritas atau kepentingan aktor-aktor tertentu. Keputusan pemerintah dalam mengadopsi atau mengeluarkan kebijakan tertentu belum tentu dapat diterima oleh semua pihak. Hasilnya berbagai polemik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah perkotaan. Contohnya yaitu beberapa keputusan pemerintah seperti di Taiwan dan Inggris, terkait pengelolaan sampah melalui insinerasi, yang pada akhirnya ditolak masyarakat (Wong, 2016; Anderson & Stage, 2018). Langkah kritis ini kemudian mendesak pemerintah Taiwan dan Inggris untuk merancang tata kelola secara lebih berkelanjutan. Tanpa ada komitmen dari berbagai tingkat pemerintah maka tidak akan tercapai tata kelola sampah berkelanjutan yang menghadapi tantangan teknologi, politik dan keuangan (Uyerra & Gee, 2013; Verawati & Tuti, 2020).

Selain dominasi birokrasi tersebut, ketidakjelasan strategi dalam mengelola sampah kota merepresentasikan minimnya komitmen dan dukungan pemerintah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Tata kelola sampah kota akan terhambat oleh kurangnya komitmen pemerintah kota dalam mengkonsolidasikan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Desentralisasi pengelolaan sampah pada otoritas kota pada akhirnya tidak serta merta menghasilkan kinerja yang baik. Perbandingan kajian antara tata kelola sampah di negara-negara maju dan negara berkembang menjelaskan tantangan ini. Dalam konteks ideal dapat dilihat dari studi kasus tata kelola sampah di Swedia. Model pengelolaan sampah dikeluarkan pemerintah pusat Swedia, sementara pemerintah kota diakomodasi dan bertanggung jawab untuk menjalankannya (Anderson & Stage, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota adalah perpanjangan tangan negara dalam mencapai ambisi tata kelola sampah berkelanjutan. Berbeda halnya yang ditemukan dalam tata kelola sampah Kota Manado, Malang, dan Kupang, dimana pemerintah kota tidak mempunyai program dan tujuan jelas dalam pengelolaan sampah (Fitriasari & Nurjannah, 2017; Wangsadasastra, 2020). Ketidakjelasan strategi yang digunakan pemerintah kota pada akhirnya sejalan dengan minimnya partisipasi pemangku kepentingan dalam mengolah sampah secara berkelanjutan. Situasi

tersebut jelas menghambat perubahan perilaku dan kesadaran pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.

Kajian sejak tahun 2000-an hingga saat ini sepakat bahwa pemerintah kota memiliki peran untuk menciptakan kebijakan penggabungan sistem pengumpulan sampah dan program daur ulang dengan mendorong partisipasi pemangku kepentingan didalamnya (Lu et. al, 2006; Periathamby, 2011). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi indikator dalam mengidentifikasi dan menilai bagaimana posisi pemangku kepentingan dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Selama proses perencanaan kebijakan, pemerintah kota sebagai pemangku kepentingan membutuhkan masukan dari para pelaku hukum, ekonomi, politik, administrasi dan lingkungan karena model tata kelola sampah di wilayah lain belum tentu sesuai untuk diadopsi. Struktur pengolahan sampah kota pada akhirnya tergantung pada kerangka kerja sosial ekonomi, perilaku, budaya dan kelembagaan, dan politik masing-masing kota. Sementara dalam tahap implementasinya, pemerintah kota juga tidak dapat berjalan sendiri dalam mensukseskan tata kelola sampah berkelanjutan. Pemerintah kota memiliki tugas untuk terus melakukan sosialisasi dan motivasi pengolahan sampah kepada masyarakat, terutama dalam membiasakan memilah sampah (Widodo, 2010). Setiap produsen sampah juga perlu dilibatkan untuk meminimalisir penggunaan produk yang berpotensi menghasilkan sampah yang tidak ramah lingkungan. Model pengelolaan sampah berkelanjutan membutuhkan kerangka kerja kolaboratif dan solid untuk meminimalkan produksi sampah mulai dari hulu hingga hilir.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Perkembangan kajian sejak tahun 2000-an hingga saat ini sepakat bahwa tantangan mendasar dalam mencapai tata kelola sampah kota berkelanjutan adalah perubahan substansial dalam perilaku dan konsumsi masyarakat (Joseph, 2006; Zaman & Lehman, 2011). Mendidik dan memberdayakan masyarakat telah menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Sebab, masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung, mempengaruhi dan berkontribusi dalam menciptakan sistem tata kelola sampah berkelanjutan (Zotos et. al., 2009). Masyarakat perlu disadarkan akan fakta bahwa sampah adalah sumber daya yang berharga. Kesadaran tersebut kemudian ditransformasikan pada perubahan perilaku dan sikap kritis terkait isu pengelolaan sampah. Beberapa kota di dunia, khususnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar, rata-rata telah memiliki masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk mengelola sampah berkelanjutan. Sementara beberapa kota di negara berkembang masih ada yang abai terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dapat kita temukan dalam studi kasus Taiwan, Swedia dan Denmark, dimana masyarakat yang direpresentasikan oleh berbagai kelompok komunitas dan penggiat lingkungan bergerak aktif mendesak pemerintah untuk membatalkan perencanaan pembangunan pabrik insinerasi yang tidak ramah lingkungan (Anderson & Stage, 2018; Wong, 2017, Halloran et. al., 2014). Sementara dalam studi kasus pada kota-kota pesisir Bangladesh, India dan Pakistan ditemukan bahwa secara umum masyarakat masih membuang sampahnya ke laut (Yeung, 2001). Begitupun di kota Mekele, Ethiopia yang sebagian besar masyarakatnya membuang sampah di tepi jalan (Tadesse et. al., 2008). Masyarakat yang tidak tersosialisasi atau teredukasi dengan baik pada akhirnya menghambat implementasi tata kelola sampah kota secara berkelanjutan.

Dalam mengatasi tantangan utama tersebut, berbagai akademisi sejak 2010-an percaya bahwa dorongan insentif ekonomi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya secara berkelanjutan. Kajian model pengelolaan sampah berbasis instrumen hukum dan tarif berimplikasi positif pada penerapannya pada beberapa kota di Cina, Taiwan, Swedia, dan Inggris (Zotos et. al., 2009 ; Timlet & Williams, 2011; Anderson & Stage, 2018; Xu et. al., 2018). Adapun langkah pemerintah yang menggunakan pendekatan insentif ekonomi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah berkelanjutan tidak serta merta menghasilkan pencapaian yang signifikan. Sebagian besar akademisi percaya bahwa sistem yang menuntut masyarakat untuk membayar sampah yang mereka hasilkan dan menghukum setiap tindakan ilegal pengelolaan sampah akan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Namun kajian termutakhir menunjukkan bahwa penerapannya di beberapa kota di Indonesia tidak

menunjukkan hasil yang demikian. Dalam konteks Indonesia dan era saat ini, pendekatan insentif ekonomi melalui program bank sampah tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya (Fitristanti & Nurjannah, 2017; Wangsadisastra, 2020). Program bank sampah adalah bentuk penghargaan ekonomi bagi masyarakat yang bersedia menukarkan sampah daur ulangnya dengan sejumlah uang. Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah cenderung minim karena insentif yang diberikan hanya dianggap penghasilan tambahan. Sebagian masyarakat belum sadar bahwa insentif ekonomi adalah pelengkap, bukan tujuan utama dalam memilah dan mendaur ulang sampah.

Pendidikan atau sosialisasi pengelolaan sampah berkelanjutan lebih penting ketimbang dorongan insentif ekonomi maupun faktor kelembagaan. Minimnya pengetahuan adalah hambatan utama yang mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan motivasi masyarakat adalah dasar dalam mengatasi tantangan akan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mengelola sampah. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan motivasi masyarakat untuk mengelola sampah diantaranya adalah norma, budaya, kebijakan pengelolaan sampah kota, kurikulum pendidikan hingga pendapatan masyarakat. Apalagi di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas. Penelitian partisipasi masyarakat Kota Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (Widodo, 2010). Hal inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung tidak peduli terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Namun, keberadaan rumah tangga yang tereduksi dan aktif terlibat dalam praktik pengolahan sampah berkelanjutan pada akhirnya akan memotivasi komunitas mereka untuk melakukan hal yang serupa (Permana, 2015). Warga yang tidak aktif mengelola sampah berkelanjutan akan mudah tereduksi dan terinspirasi oleh warga yang telah mengelola sampah berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya melakukan sosialisasi dan melakukan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan secara terus menerus untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

c. Kontribusi Kemitraan Publik-Swasta dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Kemitraan publik-swasta adalah agen eksternal dalam tatanan pemangku kepentingan tata kelola sampah perkotaan (UN-Habitat, 2010). Perkembangan kajian pasca 2010-an menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sampah kota berkelanjutan membutuhkan kemitraan publik-swasta untuk mencapai kerja sama yang efektif diantara berbagai pemangku kepentingan. Peran aktor ini lebih berorientasi profit dan terbebas dari kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan konsep kemitraan cenderung berkaitan dengan usulan pengenalan teknologi pengelolaan dan pemilahan sampah. Christensen & Bach (2015) mengungkapkan bahwa kemitraan Denmark-Vietnam memungkinkan percepatan transfer teknologi untuk menciptakan produk turunan seperti pupuk organik hingga listrik berbasis biogas. Hal yang senada juga terjadi di Indonesia, kemitraan pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo mampu membantu mengatasi masalah bau yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (Nahrudin, 2016).

Mengenai tantangan atau gambaran lainnya terkait hubungan kemitraan publik-swasta masih belum banyak diteliti oleh para ahli. Dari 22 tinjauan literatur utama dalam tulisan ini, hanya dua yang ditemukan membahas aktor ini secara spesifik. Solusi kemitraan publik-swasta ini membutuhkan investasi modal yang signifikan. Pihak swasta biasanya terkendala dalam menguji aliran pendapatan yang jelas agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang diperlukan (Christensen & Bach, 2015). Selain itu, tantangan dalam menjalankan hubungan mitra ini juga terkait dengan kendala adaptasi teknologi. Banyak investor individu yang datang membawa berbagai teknologi, tetapi beberapa diantaranya gagal beradaptasi. Bagaimanapun setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga diperlukan penyesuaian ketika ingin mengadopsi strategi yang ditawarkan pihak swasta. Hal tersebut salah satunya terjadi di Makassar, dimana kontribusi kemitraan publik-swasta ini pada akhirnya hanya mampu mengatasi satu dari beragam masalah tata kelola sampah di Makassar (Nahrudin, 2016). Penelitian yang sudah ada memang telah menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta di tingkat pemerintahan kota adalah salah satu solusi untuk mendorong percepatan dan

efisiensi transformasi tata kelola sampah kota secara lebih berkelanjutan. Tetapi, solusi kemitraan publik-swasta ini belum ada yang memperhitungkan strategi pencegahan limbah. Kontribusinya selama ini cenderung hanya berdasarkan hal-hal teknis seperti pemanfaatan zat kimia penghilang bau TPA maupun mengembangkan energi terbarukan melalui pengolahan sampah. Belum ada kajian yang menunjukkan signifikansi kemitraan-publik swasta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian masa depan terkait kontribusi kemitraan publik-swasta khususnya dalam dimensi sosial diperlukan. Sebab perkembangan kajian telah ada menunjukkan aspek teknis yang ditawarkan swasta belum mampu untuk berbagai masalah tata kelola sampah perkotaan.

4. KESIMPULAN

Pendekatan tata kelola kolaboratif yang menekankan keterlibatan semua pemangku kepentingan adalah solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dan juga menemukan kebijakan terbaik terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Tidak ada “*magic strategi*” dalam tata kelola sampah perkotaan, sebab setiap kota memiliki dinamika sosial-politik dan sumber daya masing-masing. Ada tiga aspek masalah utama dalam tata kelola sampah berkelanjutan yaitu dominasi birokrasi di pemerintahan kota, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan kurangnya kontribusi kemitraan publik-swasta. Tiga pemangku kepentingan utama teridentifikasi memiliki tantangannya masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan. Pertama, pemerintah kota sebagai penyedia layanan sering sekali abai melibatkan pemangku kepentingan lainnya karena didominasi birokrasi perkotaan. Sejalan dengan itu, komitmen dan dukungannya pun sering dipertanyakan ketika mengambil langkah pengolahan sampah yang tidak berkelanjutan. Kedua, masyarakat sebagai klien memiliki tantangan utama yang didasari oleh kurangnya pendidikan dan motivasi untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Dorongan insentif ekonomi yang dipercaya berbagai akademisi untuk mendorong partisipasi masyarakat pada akhirnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan di beberapa kota di Indonesia. Ketiga, kemitraan publik-swasta di tingkat lokal sebagai agen eksternal terkendala dalam tahap adaptasi teknologi dan aliran pendapatan yang belum teruji. Strategi teknis yang ditawarkan kemitraan publik-swasta belum mampu menjawab permasalahan sampah kota yang kompleks. Kajian yang lebih mendalam terkait kontribusi kemitraan publik-swasta, khususnya dalam dimensi sosial, perlu dilakukan untuk studi selanjutnya. Sebab pada dasarnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal adalah kunci dalam mengelola sampah kota secara berkelanjutan.

5. PERNYATAAN RESMI

Terima kasih penulis sampaikan kepada Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia atas dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Andersson, C., & Stage, J. (2018). Direct and indirect effects of waste management policies on household waste behaviour: The case of Sweden. *Waste management*, 76, 19-27. doi:10.1016/j.wasman.2018.03.038
- Bevir, M. (2008). *Key concepts in governance*. Sage.
- Christensen, D., & Bach, L. T. (2015). A Danish-Vietnamese partnership for business and technology development in solid waste management. *Resources, Conservation and Recycling*, 105, 123-133. doi:10.1016/j.resconrec.2015.10.019
- Fitriasari, F., & Nurjannah, D. (2017). Analisis pengaruh Bank Sampah Malang (BSM) terhadap pendapatan masyarakat Kota Malang. *Business Management Journal*, 12(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/268049773.pdf>
- Fung, A., & E.O. Wright. (2001). Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. *Politics and Society* 29 (1): 5-41. doi: 10.1177/0032329201029001002
- Joseph, K. (2006). Stakeholder participation for sustainable waste management. *Habitat International*, 30(4), 863-871. doi:10.1016/j.habitatint.2005.09.009
- Knickmeyer, D. (2020). Social factors influencing household waste separation: A literature review on good practices to improve the recycling performance of urban areas. *Journal of cleaner production*, 245, 118605. doi:10.1016/j.jclepro.2019.118605

- Lishan, X., Sha, H., Zhilong, Y., Ouwen, Z., & Tao, L. (2020). Identifying multiple stakeholders' roles and network in urban waste separation management-a case study in Xiamen, China. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123569. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123569
- Lu, L. T., Hsiao, T. Y., Shang, N. C., Yu, Y. H., & Ma, H. W. (2006). MSW management for waste minimization in Taiwan: The last two decades. *Waste Management*, 26(6), 661-667. doi:10.1016/j.wasman.2005.10.005
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS med*, 6(7), e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097
- Mulrow, C. D. (1994). Systematic reviews: rationale for systematic reviews. *Bmj*, 309(6954), 597-599. doi:0.1136/bmj.309.6954.597
- Nahrudin, Z. (2016). Kemitraan publik-privat dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 11-20. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/231/pdf>
- Permana, A. S., Towolioe, S., Abd Aziz, N., & Ho, C. S. (2015). Sustainable solid waste management practices and perceived cleanliness in a low income city. *Habitat International*, 49, 197-205. doi:10.1016/j.habitatint.2015.05.028
- Periathamby, A. (2011, January). Municipal waste management. In *Waste* (pp. 109-125). Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-381475-3.10008-7
- Tadesse, T., Ruijs, A., & Hagos, F. (2008). Household waste disposal in Mekelle city, Northern Ethiopia. *Waste Management*, 28(10), 2003-2012. doi:10.1016/j.wasman.2007.08.015
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, 14(3), 207-222. doi:10.1111/1467-8551.00375
- Un-Habitat. (2010). *Solid waste management in the world's cities*. UN-HABITAT.
- Uyarra, E., & Gee, S. (2013). Transforming urban waste into sustainable material and energy usage: The case of Greater Manchester (UK). *Journal of cleaner production*, 50, 101-110. doi:10.1016/j.jclepro.2012.11.046
- Verawati, S., & Tuti, R. W. D. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 10(2), 118-126. doi:10.31289/jap.v10i2.3107
- Wangsadisastra, T. S. (2020). *Partisipasi Publik Dalam Kebijakan 3r Initiative Bank Sampah Malang*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Widodo, L. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilahan Sampah (Studi Masyarakat Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok). *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 6(1). doi:10.29122/jrl.v6i1.1921
- Wong, N. W. (2017). The road to environmental participatory governance in Taiwan: collaboration and challenges in incineration and municipal waste management. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(10), 1726-1740. doi:10.1080/09640568.2016.1251400
- Xu, L., Ling, M., & Wu, Y. (2018). Economic incentive and social influence to overcome household waste separation dilemma: A field intervention study. *Waste management*, 77, 522-531. doi:10.1016/j.wasman.2018.04.048
- Yeung, Y. M. (2001). Coastal mega-cities in Asia: transformation, sustainability and management. *Ocean & Coastal Management*, 44(5-6), 319-333. doi:10.1016/S0964-5691(01)00053-9
- Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2011). Urban growth and waste management optimization towards 'zero waste city'. *City, Culture and Society*, 2(4), 177-187. doi:10.1016/j.ccs.2011.11.007
- Zaman, A. U. (2016). A comprehensive study of the environmental and economic benefits of resource recovery from global waste management systems. *Journal of cleaner production*, 124, 41-50. doi:0.1016/j.jclepro.2016.02.086
- Zotos, G., Karagiannidis, A., Zampetoglou, S., Malamakis, A., Antonopoulos, I. S., Kontogianni, S., & Tchobanoglous, G. (2009). Developing a holistic strategy for integrated waste management within municipal planning: Challenges, policies, solutions and perspectives for Hellenic municipalities in the zero-waste, low-cost direction. *Waste Management*, 29(5), 1686-1692. doi:10.1016/j.wasman.2008.11.016